BAB. I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat perkembangan pembangunan yang semakin maju dan perkembangan penangkapan ikan didaerah terutama nelayan yang masih menggunakan peralatan tradisional merupakan suatu alasan sehingga nelayan kita masih tergolong miskin. Kemiskinan nelayan ditengah kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kerusakan lingkungan pesisir dan laut didalam wilayah masyarakat yang justru memiliki kearifan lingkungan. Bukan sesuatu yang terlalu berani untuk mengatakan dan sekaligus meramalkan bahwa masa depan perikanan Indonesia terletak pada perikanan budidaya. Ada dua alasan utama untuk menyatakan hal ini, yaitu adanya kecenderungan menurunnya peran perikanan tangkap dan tersedianya sumberdaya budidaya perikanan yang cukup besar di Indonesia (Nikijulu,2005)

Dari kedua alasan tersebut diatas, secara biologi memang kegiatan budidaya ikan lebih terjamin keberlanjutannya, hal tersebut didasari dengan luasnya perairan kondisi obyektif wilayah Indonesia yang luasnya kurang lebih 7,8 juta km^2, yang terdiri atas 74,3 % laut dan 25,7 % daratan. Perairan laut seluas 5,8 juta km^2, mencakup 0,3 juta km^2 laut territorial (territorial sea), 2,8 juta km^2 perairan nusantara (archipelagic waters), dan 2,7 juta km^2 zona ekonomi ekslusif (ZEE) (Martosubroto dan Widana, 1990: 3 dalam Saad S) sehingga pengembangan sistim culture-based fishery dapat dilakukan, penangkapan ikan

dapat dikembangkan dengan dukungan utama dari budidaya terutama dalam hal penyediaan benih untuk pengkayaan sumberdaya (Resource Enhancement).

Indonesia sebagai Negara bahari dan kepulauan terbesar didunia memiliki perairan laut, yang sesuai (potensial) untuk usaha budidaya laut terluas di dunia (FAO, 2002). Berdasarkan pada perhitungan sekitar 5 km dari garis pantai kearah laut, potensi luas perairan laut Indonesia yang sesuai untuk kegiatan mariculture diperkirakan 24,5 juta ha. Luasan potensi kegiatan budidaya laut tersebut terbentang dari ujung barat sampai ke ujung timur wilayah Indonesia. Peluang pengembangan perikanan budidaya di Indonesia terbuka luas dimana secara nasional terdapat sekitar 27,6 juta ha lahan (perairan) yang berpotensi untuk dibudidayakan. Dari potensi lahan tersebut hanya sekitar 828 ribu ha (3%) yang sudah dimanfaatkan. Bila dilihat menurut jenis lahan, potensi yang cukup besar dikembangkan adalah budidaya laut (Marikultur).

Sementara sumbangan perikanan budidaya pada produksi nasional meningkat dari 19 % ditahun 2012 menjadi 21 % di tahun 2013. Pada periode sama memang pertumbuhan produksi perikanan budidaya mencapai 7,04 %, sedangkan pertumbuhan produksi perikanan tangkap hanya 4,76 %. Hal itu menunjukkan pengembangan usaha budidaya semakin memegang peranan penting dalam pembangunan perikanan Indonesia.

Teknologi keramba jaring apung (cage nets) laut dalam atau laut lepas yang telah berhasil dikembangkan oleh Norwegia, Amerika Serikat, Kanada, dan Indonesia (BPPT), maka potensi luas laut yang cocok untuk usaha mariculture tentu lebih luas. Adapun komoditas-komoditas yang dapat dibudidayakan pada

perairan laut antara lain meliputi: ikan kakap/kerapu, baronang, tiram, kerang hijau, kerang darah, teripang, kerang mutiara, abalone, dan rumput laut. Potensi produksi sumberdaya perikanan yang dapat dihasilkan, dari usaha perikanan budidaya diperkirakan sebesar 57,7 ton/tahun, dan baru diproduksi sebesar 1,6 juta ton (0,3 persen). Berdasarkan data tampak jelas bahwa peluang pengembangan usaha perikanan budidaya sebenarnya jauh lebih besar daripada usaha perikanan tangkap.

Perkembangan produksi perikanan di Sulawesi selatan, dimana budidaya semakin naik yaitu sebesar 2.235.654,8 Ton dan penangkapan semakin menurun yaitu sebesar 259.881,5 Ton data Tahun 2012 (Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan). Oleh karena itu sangat wajar bila pemerintah memberikan prioritas pada kegiatan budidaya perikanan untuk dikembangkan, sambil menjaga kestabilan dan keberlanjutan produksi ikan dari kegiatan penangkapan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, maka Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulsel tahun 2014 dengan Prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2014 meliputi :

1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk (sinergi hulu-hilir) untuk meningkatkan daya saing melalui industrialisasi berbasis komoditi dan kawasan
2. Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan upaya adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, termasuk pemberantasan illegal fishing baik di wilayah perairan laut maupun perairan umum daratan
4. Pengembangan sumberdaya manusia dan iptek kelautan dan perikanan
5. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat perikanan dengan fokus pada program Peningkatan Kehidupan Nelayan
6. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan di koridor Ekonomi Sulawesi

Dalam kerangka otonomi daerah, dimana propinsi berwenang mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai dan kabupaten berwenang mengelola wilayah laut sejauh 1/3 mil laut, maka kebijakan pembangunan perikanan memiliki peluang yang luas untuk dikembangkan. Jenis kewenangan tersebut mencakup peraturan kegiatan-kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut. Kewenangan tersebut terwujut dalam bentuk pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, serta penengakan hukum. Dengan demikian implementasi otonomi daerah membawa sejumlah implikasi terhadap aktifitas pemanfaatan sumberdaya perikanan, mencakup :

1. Sudah seharusnya daerah mengetahui potensi perikanan serta batas-batas wilayahnya sebagai dasar meregulasi pengelolaan sumberdaya, seperti penentuan jenis dan tipe kegiatan perikanan yang sesuai didaerahnya.
2. Daerah dituntut bertanggungjawab atas kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan didaerahnya.

3. Semakin terbuka peluang bagi masyarakat lokal (nelayan dan petani ikan) untuk terlibat dalam proses pengelolaan sumberdaya

Desentralisasi pengelolaan perikanan sebagai implementasi otonomi daerah menjadi sangat penting dan perlu didukung, mengingat hampir seluruh sumber daya perikanan (100 % budidaya dan sebagian besar perikanan tangkap) berada dibawah pengelolaan pemerintah daerah propinsi dan kabupaten (Nikijuluw, 2005).

Iskandar (2012), mengemukakan bahwa prioritas kebijakan perikanan di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh kegiatan yang bertumpu pada perikanan tangkap, dalam hal ini termasuk Kab. Barru, Produksi kelautan dan perikanan kab. Barru tahun 2012 yaitu sebesar 21.152,15 ton produksi ini belum memenuhi target daerah yakni 22.766,78 ton dengan rincian sebesar 1. Penangkapan dilaut sebesar 17.079 ton, target 470,7 ton, 2. Produksi budidaya sebesar 4.073,15 ton, target 363,34 ton. Hal ini menunjukkan bahwa sampai saat ini perikanan tangkap masih diharapkan sebagai pemberi kontribusi dalam bidang perikanan bagi Kab. Oleh karena itu menjadi sangat menarik untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Kab. Barru dalam bidang perikanan budidaya kedepan, mengingat bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan dalam Program Revitalisasi Perikanan telah mengembangkan perikanan budidaya sebagai sektor andalan.

Pengembangan sektor perikanan budidaya di Kab. Barru walaupun tidak sepesat perikanan tangkap tetapi dilihat dari agroekosistemnya sebagian besar adalah lahan pantai dan laut maka kegiatan yang dapat dikembangkan adalah

budidaya tambak, budidaya laut, budidaya air tawar, penangkapan ikan dan agroindustri hasil perikanan serta berbagai kegiatan lainnya. Hal ini sangat memungkinkan oleh karena berbagai faktor yang mendukung antara lain :

1. Memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar
2. Prasarana jalan ke sentra pengembangan cukup memadai
3. Berada pada daerah lintasan yang memudahkan transportasi
4. Prospek permintaan pasar komoditas perikanan dan kelautan cukup cerah.

Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Barru yaitu panjang garis pantai 78 km, luas wilayah penangkapan 56.160 Ha, luas tambak 2.594,31 Ha, Areal untuk budidaya laut 1.400 Ha serta pembenihan udang 85 unit (Hatchery 12 unit, Backyard 73 unit) selain itu pula armada penangkapan 2.183 unit, pabrik es 4 unit, Cold Storage 1 unit dan TPI/PPI 5 unit serta Tambatan perahu 3 unit. Dari data yang ada tidaklah berlebihan atau disimpulkan apabila Kab. Barru layak untuk diperhitungkan dalam pengembangan budidaya laut.

Untuk memacu pembangunan budidaya perikanan, Pemerintah Kab. Barru dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan pada Bidang Budidaya Tahun 2013 telah memprogramkan: 1. Pengembangan budidaya perikanan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan, pengadaan alat uji kualitas air, rehabilitasi saluran tambak, pengembangan bibit ikan unggul. 2. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar dengan kegiatan kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. Program tersebut dilaksanakan guna

mendukung dan mengimplementasikan program strategi pemerintah dalam bidang budidaya perikanan dengan menitik beratkan pada :

1. Upaya pengentasan kemiskinan
2. Penyerapan dan perluasan kesempatan kerja
3. Dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi

Sejalan dengan kecenderungan peningkatan pasar yang semakin meningkat seperti baronang, kerapu/kakap dan bandeng, maka Kab. Barru mempunyai peluang untuk menjadi produsen utama untuk jenis ikan tersebut serta jenis udang pada pertambakan, hal tersebut didukung dengan luas pertambakan yang ada serta tempat-tempat pembenihan udang seperti hatchery dan backyard, sementara yang termanfaatkan untuk lahan budidaya laut baru sekitar 14 % atau sekitar 200 Ha. Oleh karena itu diperlukan langkah dan kebijakan yang akan memberikan stimulus pada perubahan paradigma perencanaan dan pelaksana kegiatan perikanan budidaya yang mengacu pada pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada masyarakat.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penelitian ini dibatasi pada aspek manajemen budidaya perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru, dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut : "Bagaimana manajemen budidaya perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui manajemen budidaya perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru.

2. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat di sumbangkan bagi kepentingan dunia akademik maupun dunia praktisi,

a. Manfaat Akademik

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti berikutnya serta untuk menjadi sumbangsi bagi dunia pendidikan khususnya menyangkut manajemen pengelolaan sumberdaya budidaya perikanan.

b. Manfaat Praktisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan sebagai masukan atau pertimbangan kepada organisasi untuk meningkatkan dan perbaikan analisis manajemen budidaya perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Barru.